

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berpijak dari deskripsi di atas, maka pada bagian ini peneliti mendiskripsikan secara umum sebagai kajian atau input yang bermanfaat bagi pemerintah desa oepuah selatan Kecamatan Biboki Moenleu Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan maka dapat di simpulkan sebagai berikut

##### **5.1.1 Partisipasi Pikiran**

Kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk proses perencanaan pembangunan karena masih kurangnya kesadaran dan rasa mau atau rasa memiliki dari masyarakat. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa dan dalam melakukan perencanaan tidak melibatkan masyarakat atau hanya melibatkan sebagian masyarakat dalam musdus maupun musdes.

##### **5.1.2 Partisipasi Tenaga**

pemerintah desa sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan informasi kepada masyarakat namun banyak masyarakat yang bertolak belakang terkait dengan program perencanaan pembangunan tersebut akan tetapi dari aparat pemerintah desa berusaha untuk meyakinkan masyarakat dalam memberikan informasi dan informasi tersebut juga disampaikan pada papan informasi desa.

## 5.2 Saran

- 1) Pemerintah Desa harus mengambil keputusan berdasarkan kompleksitas masalah pembangunan yang terdapat di masyarakat sesuai dengan hasil Musdus dan Musdes.
- 2) Perlu ada peningkatan pemahaman pemerintah desa dalam unsur pembangunan mengenai mekanisme perencanaan pembangunan, pentingnya perencanaan pembangunan melalui kegiatan pelatihan atau penambahan wawasan, pendekatan yang aktif melalui kader pembangunan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
- 3) Pemerintah desa dalam mengajak, membujuk dan meyakinkan masyarakat terkait perencanaan pembangunan melalui tingkat musdus dan musdes agar masyarakat tahu dan mau dan merasa tidak dikecewakan sehingga tidak ada keluhan dari masyarakat, terlebih khusus dari pemilik lahan mengenai sikap dan keputusan dari pemerintah desa terkait dengan pelaksanaan pembangunan jalan usaha tani karena pemerintah desa tidak melibatkan masyarakat pada saat musdus dan musdes.
- 4) Masyarakat Desa oepuah selatan agar meningkatkan kesadaran dirinya guna berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan Desa. Partisipasi masyarakat harusnya ditunjukkan dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan, yang dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Dalam hal ini masyarakat harus membuka diri untuk menjadi pelaku dan pengontrol pelaksanaan pembangunan Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Conyes, Diana. 1991. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dewi, Utami. 2012. *Perencanaan Pembangunan Desa: Pendekatan Community Learning And Participatory Process (Clapp)*. Yogyakarta.
- Dwi, Ambarsari, C, et.all. 2002. *Kebijakan Publik & Partisipasi Perempuan*. Surakarta: PATTIRO.
- Mardikanto, Totok dan Poerwako Soebianto, 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik Edisi Revisi*. Bandung : Alfabeta.
- Margono, Slamet, 2003. *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*, Bogor; IPB Press.
- Nasution, Zulkarnain. 2009. *Solidaritas Sosial dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi (suatu tinjauan sosiologis)*. Malang: UMM Persa.
- Sastropoetro, santoso R. 1988. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Alumni.
- Siagian, Sondang P. 2003, *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*: Jakarta: Bumi Aksara.
- Sigit Wijaksono “Pengaruh Lama Tinggal Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Pemukiman”, Jurnal Comtech vol.4 No.1 Juni 2013, Hal 27.
- Sugiono, 2012, “Metologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D” Bandung : Alfabeta.

Suparjan dan Hempri Suyatno. 2003. *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta : Aditya Media.

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28b ayat(3) yang berbunyi: “*setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*

Y. Slamet, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipatif*, Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994, hal 7